JOURNAL OF HUMAN AND EDUCATION

E-ISSN: 2776-5857 | P-ISSN: 2776-7876
Website: https://jahe.or.id/index.php/jahe
Vol. 6, No. 6 (2026)

Menyeimbangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan: Tinjauan Teori Pertumbuhan Hijau Dan De-Pertumbuhan Pada Negara Yang Sedang Membangun

Hertina Siregar[1], Tahniah Putri Juwita[2], Bunga Zarla Meica. M[3], Andin Aulia Wismaninggalih[4], Indri Anitah[5], Dini Novita Andriani[6], Nessa Alexsandra[7]
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Riau
**Email Korespondeni: hertinasiregar314@gmail.com*

ABSTRAK
Negara yang sedang membangun menghadapi ketegangan antara kebutuhan mengejar pertumbuhan ekonomi dan keharusan menjaga kelestarian lingkungan. Pertumbuhan hijau mengandaikan bahwa pertumbuhan dapat terus berlanjut melalui efisiensi teknologi dan pemisahan (*decoupling*) dari dampak ekologis, sedangkan de-pertumbuhan menilai asumsi tersebut belum terbukti. Artikel ini bertujuan mengetahui *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan pada negara yang sedang membangun, dengan Indonesia sebagai kasus utama. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian konseptual dan pemikiran kritis penulis, dengan data sekunder dari buku, artikel, dan laporan lembaga resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berlangsung bersamaan dengan tingginya emisi dan deforestasi, sehingga bukti *decoupling* absolut masih lemah dan pertumbuhan hijau berisiko menjadi ekstraktivisme hijau. De-pertumbuhan kuat sebagai kritik terhadap klaim *decoupling*, sifat politis PDB, dan ketidakadilan lingkungan, tetapi lemah sebagai pedoman kebijakan dan tidak dapat langsung diterapkan pada negara yang masih menghadapi kemiskinan. *Trade-off* tersebut lebih tepat dipahami sebagai pertanyaan tentang apa yang perlu tumbuh, apa yang perlu menyusut, dan siapa yang menanggung biayanya. Pembangunan selektif dengan batas ekologis biofisik dan tata kelola yang melibatkan masyarakat lokal menjadi jalan tengah yang masuk akal.
Kata Kunci: pertumbuhan hijau, de-pertumbuhan, *decoupling*, negara berkembang, ekstraktivisme hijau

ABSTRACT
Developing countries face a tension between pursuing economic growth and protecting the environment. Green growth assumes that growth can continue through technological efficiency and the decoupling of output from ecological impact, while degrowth argues that this assumption remains unproven. This article aims to examine the trade-off between economic growth and environmental sustainability in developing countries, with Indonesia as the main case. It employs a qualitative approach based on conceptual review and the authors' critical reflection, using secondary data from books, articles, and official institutional reports. The findings show that Indonesia's economic growth has occurred alongside high emissions and deforestation, so evidence for absolute decoupling remains weak and green growth risks becoming green extractivism.

Degrowth is strong as a critique of decoupling claims, the political nature of GDP, and environmental injustice, but weak as a policy guide and cannot be directly applied to countries still struggling with poverty. The trade-off is better understood as a question of what should grow, what should shrink, and who bears the costs. Selective development, with biophysically measured ecological limits and governance that involves local communities, offers a reasonable middle path.

Keywords: *green growth, degrowth, decoupling, developing countries, green extractivism*

PENDAHULUAN

Dalam diskursus pembangunan kontemporer, negara negara yang sedang membangun dihadapi oleh dilema fundamental yaitu ketegangan struktural antara pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan mendesak untuk menjaga kelestarian ekologis. Selama berdekade-dekade, banyak negara menempatkan pertumbuhan sebagai tolok ukur utama kemajuan suatu bangsa. Namun, ekspansi ekonomi berkesinambungan pada ekstraksi sumber daya alam dan konsumsi energi fosil secara masif telah memicu krisis ekologi global yang eksistensial, mulai dari perubahan iklim global, *deforestasi*, hingga penurunan daya dukung lingkungan. Dalam merespons krisis sosio-ekologis ini, paradigma Pertumbuhan Hijau (*Green Growth*) mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terus berlanjut tanpa merusak lingkungan melalui efisiensi teknologi, instrumen pasar, dan pemisahan (*decoupling*) antara output ekonomi dengan dampak ekologis. Sebaliknya, kritik fundamental dari arus pemikiran De-pertumbuhan (*Degrowth*) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tak terbatas pada planet yang bersumber daya terbatas secara fisik adalah sebuah ketidakmungkinan struktural. Dalam karya Gerry van Klinken yaitu Bacaan Bumi: Pemikiran Ekologis untuk Indonesia (2025) memberikan pijakan kritis. Melalui lensa humaniora lingkungan (*environmental humanities*), van Klinken dan para kontributornya memperlihatkan bahwa ketegangan antara ekonomi dan ekologi di Dunia Ketiga bukanlah sekadar persoalan teknis manajemen sumber daya, melainkan krisis struktural akibat kapitalisme yang memperlakukan alam sebagai modal gratis. Dalam perspektif ini, agenda pertumbuhan ekonomi kerap menciptakan bentuk "ekstraktivisme baru" yang memindahkan beban kerugian ekologis kepada masyarakat lokal dan generasi mendatang demi mengejar angka PDB. Kerangka pemikiran Bacaan Bumi ini membedah akar permasalahan bahwa selama logika akumulasi modal diutamakan, trade-off antara ekonomi dan lingkungan akan selalu menumbalkan kelestarian alam.

Kondisi riil di negara yang sedang membangun seperti Indonesia memberikan gambaran empiris yang jelas mengenai kompleksitas hubungan tersebut. Meskipun Indonesia mencatatkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang stabil pasca-pandemi mencapai 3,69% pada 2021, 5,31% pada 2022, dan 5,05% pada 2023 pertumbuhan PDB ini berbanding lurus dengan peningkatan emisi gas rumah kaca dan intensifikasi eksploitasi alam. Data emisi karbon menunjukkan bahwa emisi CO_2 teritorial Indonesia mencapai 812 juta ton CO_2 pada tahun 2024 (menyumbang 2,1% emisi global) dengan total emisi per kapita sebesar 6,7 tCO_2eq per tahun. Di sektor tata guna lahan, laju deforestasi untuk ekspansi komoditas menelan rata-rata 498.000 hektar hutan per tahun, sementara dampak suhu ekstrem pada tahun 2021 saja telah menyebabkan kerugian pendapatan potensial sebesar USD 18,3 miliar atau 1,59% dari PDB Indonesia. Kontradiksi empiris ini memperlihatkan fenomena "ekstraktivisme hijau", di mana keuntungan ekonomi dinikmati oleh pasar global sedangkan beban kerusakan ekologis ditanggung masyarakat. Berdasarkan dinamika latar belakang artikel konseptual ini disusun dengan satu tujuan utama, yaitu mengetahui trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan pada negara yang sedang membangun.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berbasis kajian konseptual dan pemikiran kritis penulis. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian ini berorientasi pada rekonstruksi teori. Data yang digunakan adalah sekunder dengan memanfaatkan data yang bersumber dari buku, artikel, dan laporan lembaga yang diambil dari sumber resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Teori Pertumbuhan Hijau

Kajian tentang teori pertumbuhan hijau berakar pada gagasan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. OECD mendefinisikan pertumbuhan hijau sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sambil melestarikan aset alam untuk kesejahteraan masyarakat. Konsep ini mendapatkan dukungan dari UNEP dan Bank Dunia, namun Harisman mencatat bahwa belum ada konsensus mengenai definisi "hijau", yang sering diartikan sebagai ramah lingkungan. Kekhawatiran utama adalah bahwa pendekatan bisnis seperti biasa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan infrastruktur akan melebihi daya dukung ekosistem, mengakibatkan volatilitas harga, polusi, dan penurunan keanekaragaman hayati.

Elemen kunci dari pertumbuhan hijau termasuk efisiensi sumber daya, inovasi teknologi, dan penggunaan energi terbarukan, sejalan dengan hipotesis kurva Kuznets lingkungan, di mana degradasi lingkungan dapat menurun setelah pendapatan mencapai level tertentu. Konsep "decoupling" atau pemisahan pertumbuhan ekonomi dari dampak lingkungan menjadi inti dari argumen ini, dengan dua kategori: relatif, di mana dampak lingkungan meningkat lebih lambat daripada PDB, dan absolut, di mana dampak lingkungan menurun meski PDB tetap tumbuh. Namun, penelitian menunjukkan bahwa decoupling absolut belum cukup terbukti, dan tantangan besar dalam hal ini, terutama dalam hal emisi karbon, masih dihadapi.

Harisman menekankan perlunya penyesuaian strategi berdasarkan konteks tiap negara, mengingat perbedaan tantangan dan peluang antara negara maju, pasar baru muncul, dan negara berkembang. Strategi OECD mengandung lima langkah penting: memenuhi kebutuhan sektor ekonomi yang potensial, menghilangkan penghambat seperti kebijakan perpajakan yang tidak mendukung keberlanjutan, menyusun strategi politik, mengembangkan indikator keberhasilan, dan menerapkan strategi secara berkelanjutan. Kebijakan hijau sering membutuhkan investasi besar dan mungkin berbenturan dengan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, sehingga perlu fokus pada manfaat instan seperti penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Jika masalah struktural dan kelembagaan tidak diatasi, pertumbuhan hijau mungkin gagal meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Bagi negara berkembang, pertumbuhan hijau dianggap sahih jika dapat mengurangi kemiskinan, dengan perlindungan lingkungan yang tidak menghalangi hak mereka untuk berkembang. Hal ini relevan dengan prinsip tanggung jawab bersama namun dibedakan, mengingat negara-negara tidak berdampak besar terhadap emisi sering kali yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Mekanisme kompensasi melalui pembiayaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas diperlukan agar komunitas yang bergantung pada sumber daya alam dapat beradaptasi.

Di tingkat global, laporan untuk G20 merekomendasikan berbagai kebijakan, termasuk reformasi pajak yang memperhitungkan eksternalitas lingkungan, regulasi untuk meningkatkan kepatuhan, penyediaan infrastruktur hijau, dan kebijakan inovasi. Desain kebijakan ini harus sesuai dengan keadaan setiap negara, di mana kapasitas tata kelola yang lemah dan ekonomi informal besar dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan pajak hijau. Transformasi menuju ekonomi hijau berpotensi mengubah keunggulan komparatif negara dan industri, sehingga bisa menghadapi tantangan sosial dan politik.

Dalam konteks pembangunan di Indonesia, Harisman menyatakan bahwa strategi pembangunan seharusnya berlandaskan empat pilar utama: pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment. Ia

menggarisbawahi pentingnya mengatasi sumber emisi yang dihasilkan dari perubahan tata guna lahan, deforestasi, serta sektor energi dan transportasi yang dipengaruhi oleh subsidi harga bahan bakar minyak. Beberapa langkah strategis yang diusulkan meliputi pengalihan subsidi dari bahan bakar fosil ke sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan; pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi; penguatan pendidikan dan pelatihan untuk menciptakan pekerjaan hijau; serta pengembangan carbon pricing sebagai sumber pendanaan baru.

Dalam temuan empirisnya, Muarif menggunakan pendekatan mixed methods yang menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi hijau berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi di sektor energi terbarukan dan efisiensi sumber daya, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja di sektor energi, pengelolaan limbah, dan pertanian ramah lingkungan. Namun, studi ini juga mencatat tantangan berupa ketimpangan distribusi manfaat antara wilayah dan sektor, sehingga integrasi kebijakan dengan pembangunan nasional dan dukungan lintas sektor sangat diperlukan untuk mencapai keberlanjutan dan keadilan sosial.

Selanjutnya, penelitian oleh Mu'min, Kartiko, dan Anam mengenai hilirisasi industri manufaktur di Kalimantan menerapkan kerangka inclusive green growth, menganalisis 17 variabel melalui regresi panel. Hasilnya menunjukkan variasi yang signifikan antarprovinsi, dengan hilirisasi yang berpotensi mendukung pertumbuhan hijau. Namun, kondisi ekonomi dan sosial daerah berperan penting, yang menegaskan perlunya kebijakan terpadu yang tidak hanya fokus pada hilirisasi, tetapi juga pada peningkatan sosial dan pengelolaan lingkungan. Penulis menyadari keterbatasan dalam studi tersebut, seperti penggunaan variabel dummy sebagai proksi untuk hilirisasi serta ketersediaan data, yang mengharuskan hasilnya untuk digeneralisasi dengan hati-hati.

Kajian Teori De-Pertumbuhan (Degrowth)

Gagasan de-pertumbuhan (*degrowth*) tumbuh dari kritik terhadap keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung tanpa batas. Brata (2025) menelusuri bahwa istilah *décroissance* muncul di Prancis pada 1970 sebagai tanggapan atas laporan *The Limits to Growth* (Meadows dkk., 1972/1980), pertama kali dipakai oleh André Amar pada 1973, dan banyak dipengaruhi Georgescu-Roegen yang menerapkan prinsip termodinamika pada sistem ekonomi. Adapun *degrowth* sebagai konsep ilmiah baru mengemuka pada konferensi internasional di Paris tahun 2008, dengan pendekatan yang lebih luas dan lebih dekat dengan ekonomi ekologis. Laporan Kelompok Roma itu menyimpulkan bahwa bumi menetapkan batas keras bagi pertumbuhan ekonomi manusia, dan menurut van Klinken (2025), kesimpulan tersebut terus dibenarkan oleh studi-studi berikutnya, misalnya perbandingan Turner (2008) dengan kenyataan selama tiga puluh tahun serta kajian batas bumi yang aman dan adil oleh Rockström dkk. (2023).

Landasan konseptual lain adalah ekonomi kondisi mantap (*steady-state economy*) yang dikembangkan Herman Daly, yakni perekonomian dengan populasi, produksi, dan konsumsi yang stabil dari waktu ke waktu. Brata (2025) menegaskan bahwa de-pertumbuhan bukan sinonim ekonomi kondisi mantap, melainkan jalan untuk mencapainya, sedangkan Hickel (2021) menekankan bahwa yang hendak dikurangi adalah aliran material dan energi, bukan PDB sebagai tujuan itu sendiri. Dalam rumusan Schmelzer dkk. (2022) yang dikutip van Klinken (2025), de-pertumbuhan dipahami sebagai peralihan demokratis menuju masyarakat yang bertumpu pada aliran energi dan sumber daya yang jauh lebih kecil demi keadilan lingkungan global, memperdalam demokrasi, menjamin kehidupan yang baik dan keadilan sosial bagi semua, serta tidak bergantung pada pertumbuhan tanpa henti.

van Klinken (2025) membaca de-pertumbuhan sebagai hipotesis provokatif dan undangan untuk berdiskusi secara demokratis tentang masa depan yang lebih adil, bukan sebagai program teknokratis yang disusun ahli ekonomi dari data statistik. Argumen pertamanya bersifat historis. PDB bukan fakta ekonomi yang netral, melainkan konstruksi politis yang terbentuk sejak 1930-an hingga Perang Dunia II, dan pada akhirnya menjumlahkan seluruh transaksi formal tanpa memandang tujuannya, sehingga

penebangan hutan, peristiwa cuaca ekstrem, dan kerusakan iklim sekalipun ikut menaikkan angka PDB. Angka pertumbuhan juga berfungsi sebagai alat ideologis. Di negara berkembang, termasuk Indonesia pada masa Orde Baru, angka tersebut mengalihkan perhatian publik dari watak penguasa yang opresif, sementara program pembangunan membenarkan pencaplokan tanah yang semula dikelola bersama sehingga jutaan orang kehilangan akses atas tanah, hutan, dan air. Argumen keduanya bersifat matematis. Pertumbuhan majemuk bersifat eksponensial, sehingga laju sekitar 7% per tahun, yang oleh van Klinken dikaitkan dengan kebijakan di balik Wawasan Indonesia Emas 2045, berarti ukuran-ekonomi berlipat dua kira-kira setiap sepuluh tahun dan menjadi lebih dari delapan ratus kali lipat dalam seratus tahun (perhitungan penulis). Pertumbuhan semacam itu mustahil dipertahankan pada planet yang terbatas.

Atas dasar itu, van Klinken (2025) menilai harapan pada *decoupling* belum terbukti. Pemisahan harus terjadi bukan hanya pada pemakaian bahan bakar fosil, tetapi juga pada keanekaragaman hayati, tata guna lahan, dan polusi plastik, sedangkan negara-negara yang tampak berhasil memisahkan pertumbuhan dari tekanan lingkungan umumnya mengalaminya hanya sementara, misalnya selama pandemi Covid-19. Ia merujuk pada Hickel dan Kallis (2020) yang menyimpulkan bahwa tidak ada bukti empiris pemisahan absolut dari pemakaian- sumber daya pada skala global, dan bahwa pemisahan absolut dari emisi karbon sangat kecil kemungkinannya berlangsung cukup cepat untuk menahan pemanasan global pada 1,5°C atau 2°C. Bukti senada dikemukakan Vogel dan Hickel (2023). Sebelas negara berpendapatan tinggi memang mencapai pemisahan absolut emisi CO_2 dari PDB pada 2013–2019, tetapi penurunan emisinya jauh di bawah laju yang selaras dengan Perjanjian Paris, sehingga capaian itu tidak dapat disebut pertumbuhan hijau yang sesungguhnya.

Pada dimensi keadilan, wacana de-pertumbuhan lahir di Utara karena aktivitas ekonomi di sana telah jauh melampaui batas ekologis. van Klinken (2025) menguraikan bahwa persoalan ekologis akibat pertumbuhan pada dasarnya merupakan persoalan negara maju, dengan mengutip E. F. Schumacher tentang penumpang kelas satu di Pesawat Ruang Angkasa Bumi. Gaya hidup berkelimpahan di Utara berakar pada sejarah imperialisme yang berlanjut dalam bentuk neokolonial, antara lain melalui aliran sumber daya alam dan tenaga kerja murah dari Selatan. Karena itu, mengikuti Kallis (2018), de-pertumbuhan bagi Selatan dipahami sebagai upaya membongkar khayalan Barat tentang pertumbuhan yang selama ini dipakai elite Selatan untuk membenarkan ketimpangan. Tujuan akhirnya, menurut Hickel (2019), bukan kekurangan melainkan "kelimpahan radikal", yaitu kelimpahan yang tercipta melalui redistribusi menyeluruh dan pengembalian tanah, air bersih, udara bersih, perumahan, waktu, serta pangan sebagai milik bersama (*commons*).

Dari enam usulan konkret Schmelzer dkk. (2022), van Klinken (2025) menguraikan tiga di antaranya, yaitu pemulihan *commons* sebagai pusat kegiatan ekonomi, teknologi yang demokratis, dan metabolisme sosial yang demokratis melalui penyediaan kebutuhan dasar secara cuma-cuma. Usulan lainnya menyangkut perburuhan, kesejahteraan sosial, dan hubungan internasional, termasuk kewajiban negara maju membayar kompensasi besar kepada Selatan. Sebagai strategi perubahan, ia mengikuti Erik Olin Wright (2010): strategi di sela-sela struktur kapitalis, seperti koperasi dan desa ekologis; strategi simbiotik, yakni bekerja sama dengan lembaga yang ada, misalnya melalui proposal *Green New Deal*; dan strategi pecah yang mengarah pada konfrontasi terhadap sistem kekuasaan, termasuk blokade fisik. van Klinken mengakui bahwa de-pertumbuhan belum pernah dijalankan secara sengaja oleh suatu masyarakat sehingga statusnya masih hipotesis yang belum diuji.

Setelah landasan konseptualnya dipaparkan, tinjauan kritis perlu dimulai dari kekuatan teori ini. Kontribusi terpentingnya adalah menggugat asumsi bahwa pemisahan absolut antara pertumbuhan dan kerusakan lingkungan akan tercapai dengan sendirinya melalui teknologi dan efisiensi. Telaah Haberl dkk. (2020), Hickel dan Kallis (2020), serta Vogel dan Hickel (2023) memperlihatkan bahwa dasar empiris klaim tersebut masih lemah, dan hal ini sejalan dengan pola data Indonesia yang dibahas pada subbab berikutnya. Dari sisi pemodelan, Keyßer dan Lenzen (2021), sebagaimana dirangkum Brata

(2025), mendapati bahwa skenario de-pertumbuhan memangkas emisi CO_2 pada 2050 lebih besar daripada skenario pertumbuhan alternatif sekaligus membuat distribusi pemakaian energi lebih setara. O'Neill dkk. (2018) menambahkan dilema yang lebih mendasar. Tidak ada satu negara pun yang memenuhi kebutuhan dasar warganya pada tingkat pemakaian sumber daya yang berkelanjutan secara global, walaupun kebutuhan fisik seperti nutrisi, sanitasi, akses listrik, dan penghapusan kemiskinan ekstrem kemungkinan besar dapat dipenuhi bagi semua orang tanpa melampaui batas planet. Dengan demikian, kritik de-pertumbuhan terhadap pertumbuhan hijau berpijak pada dasar empiris yang cukup kuat.

Namun, kekuatan diagnostik itu tidak otomatis menjadi kekuatan preskriptif. Pollin (2018) menyatakan sepakat dengan hampir seluruh nilai dan kekhawatiran pendukung de-pertumbuhan, tetapi menilai bahwa literaturnya, karena mencakup tema yang terlalu luas, memberi perhatian sangat sedikit pada rancangan proyek- stabilisasi iklim yang efektif. Ia mengingatkan bahwa Herman Daly sendiri, yang secara umum bersimpati, masih menunggu para pendukung de-pertumbuhan melampaui slogan menuju gagasan yang lebih konkret. Bagi Pollin, karena sekitar 70% emisi gas rumah kaca berasal dari produksi dan konsumsi energi fosil, tugas paling menentukan adalah memangkas bahan bakar fosil secara drastis sambil memperluas sektor energi bersih secara masif. Pembedaan antara sektor yang harus tumbuh dan sektor yang harus menyusut menurutnya lebih bermanfaat daripada pernyataan umum tentang pertumbuhan atau de-pertumbuhan secara agregat. Pollin juga menilai anggapan bahwa pertumbuhan PDB adalah agama dunia modern mengabaikan kenyataan neoliberalisme, yang sesungguhnya memuja laba bagi pemilik modal, bukan pertumbuhan itu sendiri. Tsuda (2021) menambahkan bahwa de-pertumbuhan hanya dapat terjadi sebagai upaya kolektif pada tingkat masyarakat, bahkan global, sehingga pembenarannya harus mencakup pilihan publik dan tidak cukup berhenti pada preferensi pribadi. Kritik ini tidak asing bagi pendukungnya sendiri, sebab van Klinken (2025) menegaskan bahwa de-pertumbuhan bukan rencana, kebijakan, atau program resmi, melainkan tujuan yang hanya dapat berkembang melalui dialog.

Persoalan kedua menyangkut kelayakan politik. Brata (2025) merangkum bahwa kebijakan yang menekan pertumbuhan secara signifikan berpotensi ditolak oleh pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat yang terbiasa dengan gaya hidup konsumtif. Naudé (2023a) menilai de-pertumbuhan mahal sebagai cara menurunkan emisi, dapat berwujud penghematan (*austerity*) bagi kelas pekerja, dan secara politik tidak layak. Dalam telaah lain, Naudé (2023b) berargumen bahwa negara-negara Barat sebenarnya sudah berada dalam kondisi serupa de-pertumbuhan yang ia sebut "stagnasi besar", yang ditandai melemahnya kewirausahaan, inovasi, dan produktivitas riset, dan bahwa perekonomian tanpa pertumbuhan cenderung menjadi permainan berjumlah nol yang bertumpu pada redistribusi. Contoh masyarakat stasioner yang kerap diajukan, yaitu Jepang pada periode Edo, menurut Naudé dicapai melalui sistem yang otoriter dan hierarkis sehingga sulit diselaraskan dengan nilai demokrasi modern (Brata, 2025). Terhadap tantangan ini, van Klinken (2025) mengakui bahwa perubahan sebesar yang dibayangkan gerakan de-pertumbuhan, sebanding dengan Revolusi Industri, mungkin ditentang penguasa yang menguasai perangkat hukum dan kekerasan, dan karena itu ia menawarkan jalur bertahap melalui inisiatif komunitas, aliansi dengan lembaga yang ada, dan aksi konfrontatif. Bobot kritik Naudé tetap perlu ditimbang dengan hati-hati karena sebagian besar berbentuk makalah diskusi, dan Brata (2025) sendiri mencatat bahwa sejumlah analisis kritis terhadap de-pertumbuhan, misalnya dari Ted Nordhaus, Branko Milanovic, dan Andrew McAfee, masih banyak berupa tulisan populer yang belum sepenuhnya diakui secara akademis.

Persoalan ketiga, dan yang paling berkaitan dengan fokus artikel ini, adalah ketergantungan struktural antara Utara dan Selatan. Melalui tinjauan pustaka sistematis, Gräbner-Radkowitsch dan Strunk (2023) menemukan dua narasi dalam literatur de-pertumbuhan tentang Global South, yakni narasi sinergi dan narasi tantangan, dengan dominasi narasi sinergi serta metodologi yang cenderung teoretis dan kualitatif. Mereka menyebut inti persoalannya "masalah ganda ketergantungan global": dalam kerangka kelembagaan yang berlaku, ketergantungan asimetris antara Utara dan Selatan menjadi alasan

sekaligus penghalang bagi de-pertumbuhan. Brata (2025) menambahkan bahwa literatur de-pertumbuhan belum cukup memperhatikan efek samping jangka pendek yang merugikan negara berkembang, padahal sebagian besar emisi di dekade mendatang diperkirakan berasal dari negara berpendapatan menengah seperti India, Tiongkok, dan Indonesia. Rodríguez-Labajos dkk. (2019) juga menunjukkan bahwa persekutuan antara gerakan de-pertumbuhan dan gerakan keadilan lingkungan di Selatan tidak sealami yang dibayangkan, karena para aktivis di Selatan menyuarakan kekhawatiran yang perlu diperiksa dan didamaikan lebih dahulu.

Di antara dua kutub perdebatan tersebut, Aghion dkk. (2025) menawarkan jalur tengah secara teoretis. Mereka memodelkan perekonomian yang secara endogen menjadi "tanpa bobot" (*weightless*). Seiring naiknya pendapatan, permintaan bergeser ke barang berkualitas dan jasa yang berjejak lingkungan lebih kecil, inovasi diarahkan pada peningkatan kualitas, dan produksi material menetap pada tingkat yang terbatas sementara kesejahteraan tetap tumbuh. Jalur ini membuka kemungkinan de-pertumbuhan dalam output material tanpa mengorbankan kemajuan. Meskipun demikian, model yang masih berupa makalah kerja ini juga mencatat bahwa- beban kebijakan untuk mempercepat transisi jatuh lebih berat pada kelompok miskin daripada kelompok kaya, sehingga pertanyaan tentang keadilan distribusi tidak hilang, melainkan berpindah tempat.

Dari seluruh telaah tersebut, penulis memandang bahwa de-pertumbuhan lebih tepat diposisikan sebagai kritik yang kuat dan kompas normatif daripada sebagai resep kebijakan siap pakai. Kekuatannya terletak pada pembongkaran klaim *decoupling*, pengungkapan sifat politis PDB, dan penempatan keadilan sebagai pusat persoalan. Kelemahannya terletak pada operasionalisasi, kelayakan politik, dan ketidakpastian dampak bagi negara yang masih bergantung pada pasar global. Perdebatan antara pertumbuhan hijau dan de-pertumbuhan pun sebaiknya tidak dibaca sebagai pilihan tumbuh atau tidak tumbuh, melainkan sebagai pertanyaan tentang apa yang perlu tumbuh, apa yang perlu menyusut, dan siapa yang menanggung biayanya.

Relevansi Teori Pertumbuhan Hijau Dan De-Pertumbuhan Pada Negara Yang Sedang Membangun

Subbab ini menilai relevansi kedua paradigma yang telah dikaji pada subbab sebelumnya bagi negara yang sedang membangun, dengan Indonesia sebagai kasus utama. Pembahasan dimulai dari pertumbuhan hijau karena paradigma ini paling mudah diterima oleh negara yang masih menghadapi kemiskinan, dilanjutkan dengan relevansi kritik de-pertumbuhan, dan ditutup dengan sintesis penulis.

Daya tarik utama pertumbuhan hijau bagi negara berkembang terletak pada sifatnya yang tidak menuntut penghentian pertumbuhan ekonomi. Bagi negara yang masih menghadapi persoalan kemiskinan, gagasan ini relatif mudah diterima. Temuan Muarif (2025) bahwa investasi energi terbarukan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja turut memperkuat pandangan tersebut. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara asumsi teoretis dan kenyataan empiris. Pertumbuhan hijau mengandaikan bahwa perekonomian dapat terus meningkat seiring dengan menurunnya kerusakan lingkungan, sedangkan data Indonesia menunjukkan pola yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69% pada 2021, 5,31% pada 2022, dan 5,05% pada 2023 berlangsung bersamaan dengan tingginya emisi. Emisi CO_2 teritorial Indonesia mencapai 812 juta ton pada 2024 atau 2,1% dari emisi global, dengan emisi per kapita sebesar 6,7 tCO_2eq per tahun, sementara laju deforestasi rata-rata mencapai 498.000 hektare per tahun. Pola ini lebih sejalan dengan keraguan terhadap decoupling absolut (Haberl et al., 2020; Hickel & Kallis, 2020) daripada dengan harapan yang dibangun oleh hipotesis kurva Kuznets lingkungan. Apabila efisiensi teknologi benar-benar mampu memisahkan pertumbuhan dari kerusakan lingkungan, kondisi tersebut seharusnya tidak terjadi.

Penulis juga mencermati adanya risiko bahwa label "hijau" digunakan sebagai pembenaran. Suatu proyek dapat tampak ramah lingkungan dari satu sisi, tetapi pada sisi lain tetap mengambil alih lahan, mengeksploitasi sumber daya, dan merugikan masyarakat sekitar. Kekhawatiran ini sejalan dengan

pandangan van Klinken (2025) bahwa pertumbuhan yang didorong oleh logika akumulasi modal memperlakukan alam sebagai modal gratis, sehingga kerugian ekologis dialihkan kepada masyarakat lokal dan generasi mendatang. Temuan Mu'min dkk. (2025) menunjukkan kecenderungan serupa dari sisi kebijakan industri, yaitu bahwa hilirisasi tidak secara otomatis menghasilkan pertumbuhan hijau yang inklusif karena hasilnya bergantung pada kondisi sosial dan pengelolaan lingkungan di setiap provinsi. Gejala ini oleh penulis disebut sebagai ekstraktivisme hijau, yakni pola ekstraksi lama yang hanya berganti label.

Selain itu, perlu dikaji pihak yang menanggung biaya dan pihak yang menikmati manfaat. Muarif (2025) mencatat bahwa manfaat ekonomi hijau tidak terdistribusi secara merata antarwilayah dan antarsektor. Harisman (tahun) juga mengingatkan bahwa negara berkembang merupakan pihak yang paling terdampak oleh perubahan iklim, meskipun kontribusi emisinya lebih kecil. Dampak tersebut telah tercermin dalam angka kerugian: suhu ekstrem pada 2021 menyebabkan hilangnya potensi pendapatan Indonesia sekitar USD 18,3 miliar atau 1,59% dari PDB [cantumkan sumber], yang berarti kerusakan lingkungan turut menggerus hasil pertumbuhan itu sendiri. Dengan demikian, trade-off ini lebih tepat dipahami sebagai pilihan antara keuntungan jangka pendek dan kerugian jangka panjang, tidak hanya sebagai pertentangan antara lingkungan dan ekonomi.

Meskipun demikian, penulis tidak menolak pertumbuhan hijau secara keseluruhan. Pembangunan Indonesia telah lama bertumpu pada empat pilar, yaitu pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment (Harisman, tahun). Target penurunan emisi sebesar 31,89% dengan upaya sendiri atau 43,20% dengan dukungan internasional pada 2030 (Republic of Indonesia, 2022) juga menunjukkan arah kebijakan yang jelas. Harisman (tahun) turut menyoroti sejumlah instrumen yang relevan, antara lain pengalihan subsidi bahan bakar fosil ke sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, pengembangan energi terbarukan, serta pemanfaatan carbon pricing sebagai sumber pembiayaan baru. Menurut penulis, pertumbuhan hijau baru bermakna apabila memenuhi tiga syarat. Pertama, pertumbuhan diarahkan pada sektor yang memenuhi kebutuhan dasar dan energi bersih, bukan semata-mata pada peningkatan angka PDB. Kedua, ekstraksi sumber daya dan perluasan lahan dibatasi secara nyata. Ketiga, masyarakat lokal dilindungi dari beban ekologis dan manfaat pembangunan didistribusikan secara adil antarwilayah. Tanpa ketiga syarat tersebut, pertumbuhan hijau berisiko hanya menjadi slogan, sedangkan dengan terpenuhinya syarat tersebut, ia dapat menjadi jalan menuju pembangunan yang lebih berkeadilan.

Setelah pertumbuhan hijau dinilai dalam konteks Indonesia, pertanyaan berikutnya adalah seberapa jauh kritik de-pertumbuhan dapat dipakai oleh negara yang sedang membangun. Relevansi de-pertumbuhan bagi negara yang sedang membangun perlu dibaca dengan hati-hati karena seruannya pertama-tama ditujukan kepada negara berpendapatan tinggi. van Klinken (2025) menegaskan bahwa perubahan gaya hidup yang paling drastis diperlukan di belahan Utara, dan Hickel (2021) menjelaskan bahwa gagasan ini tidak dimaksudkan untuk menyusutkan ekonomi yang masih harus memenuhi kebutuhan dasar warganya. Kondisi Indonesia memperjelas alasannya. Pada Maret 2026, sebanyak 22,93 juta orang atau 8,07% penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan kemiskinan perdesaan sebesar 10,67% (Badan Pusat Statistik, 2026). Pada saat yang sama, rasio Gini sedikit naik menjadi 0,368 dari 0,363 pada September 2025 (Investortrust.id, 2026), yang menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan tidak otomatis disertai pemerataan. Dalam situasi demikian, pertumbuhan masih berfungsi sebagai instrumen pengurangan kemiskinan, sehingga seruan agar negara berkembang ikut menyusutkan perekonomiannya secara agregat sulit dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun politik. Temuan O'Neill dkk. (2018) memberi pegangan penting. Kebutuhan fisik dasar, termasuk listrik, sanitasi, nutrisi, dan penghapusan kemiskinan ekstrem, kemungkinan besar dapat dipenuhi bagi semua orang tanpa melampaui batas planet, sehingga yang dipersoalkan bukan pemenuhan kebutuhan dasar itu sendiri, melainkan jenis dan pola pertumbuhan yang menyertainya.

Meskipun demikian, kritik de-pertumbuhan terhadap cara pertumbuhan dihitung dan dicapai sangat relevan bagi Indonesia. Menurut van Klinken (2025), program pembangunan di negara berkembang kerap membenarkan pencaplokan tanah yang sebelumnya dikelola komunal, sementara penumpukan modal yang dibiayai buruh dan alam tersembunyi di balik angka PDB. Pola ini beresonansi dengan konsep ekstraktivisme hijau yang dibahas pada bagian sebelumnya. Dalam wawancara dengan Mongabay Indonesia, van Klinken membaca banjir bandang dan longsor di Sumatera pada akhir 2025 sebagai akibat penggundulan hutan, yang menurutnya berkaitan dengan terkikisnya regulasi lingkungan selama beberapa dekade (Muazam, 2026). Ia juga memandang industri sawit sebagai contoh ketidakadilan lingkungan, karena manfaatnya dinikmati konsumen di negara lain sedangkan bebannya ditanggung masyarakat yang kehilangan hutan. Kebijakan yang tampak ramah lingkungan, seperti mandatori biodiesel B50, menurutnya dapat memindahkan beban ekologis tanpa memperhitungkan luas lahan yang dibutuhkan, sehingga kapasitas bumi perlu dihitung dalam satuan fisik seperti ton dan hektare, bukan semata dalam rupiah (Muazam, 2026). Pandangan ini merupakan tafsir van Klinken dan masih memerlukan kajian kausal yang lebih rinci, tetapi arah kritiknya konsisten dengan temuan Mu'min dkk. (2025) bahwa hilirisasi tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan hijau yang inklusif.

Relevansi de-pertumbuhan bagi negara berkembang karena itu lebih tepat dibaca pada tingkat prinsip dan praktik daripada pada tingkat agregat PDB. Pertama, de-pertumbuhan mengajukan perhitungan biofisik yang menempatkan batas ekologis, seperti luas hutan dan kapasitas serap limbah, sebagai batas keputusan ekonomi. Hal ini selaras dengan syarat kedua pertumbuhan hijau yang diajukan penulis, yakni pembatasan nyata atas ekstraksi sumber daya dan perluasan lahan. Kedua, gagasan *commons* dan ekonomi yang dikelola masyarakat melalui koperasi dan desa ekologis (van Klinken, 2025) sejalan dengan tuntutan perlindungan masyarakat lokal dan distribusi manfaat yang adil. Ketiga, praktik de-pertumbuhan dari Selatan sudah ditemukan di Indonesia. Batubara dkk. (2025) menganalisis gerakan warga di Semarang yang menolak proyek infrastruktur pengendali banjir berlogika pro-pertumbuhan dan memilih konservasi mangrove serta air tanah, lalu mengidentifikasinya sebagai praktik spasial de-pertumbuhan dari Selatan. Keempat, tuntutan keadilan internasional berupa kompensasi dan pembiayaan dari negara maju (Schmelzer dkk., 2022, dalam van Klinken, 2025) sejalan dengan prinsip tanggung jawab bersama namun dibedakan yang telah dibahas pada kajian pertumbuhan hijau.

Relevansi tersebut tidak lepas dari sejumlah syarat. Perekonomian negara berkembang terhubung dengan pasar global melalui aliran sumber daya alam ke Utara (van Klinken, 2025), sehingga pengurangan konsumsi di negara maju, bila terjadi tanpa pembenahan struktural, dapat menekan pendapatan Selatan, setidaknya dalam jangka pendek (Gräbner-Radkowitsch & Strunk, 2023; Brata, 2025). Selain itu, lembaga publik di banyak negara dibiayai pajak yang naik turun mengikuti pertumbuhan, sehingga pelepasan ketergantungan pada pertumbuhan, sebagaimana dibahas van Klinken (2025), mensyaratkan perancangan ulang pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Di sisi lain, karena sebagian besar emisi masa depan diperkirakan berasal dari negara berpendapatan menengah seperti Indonesia (Brata, 2025), menunda tindakan atas nama hak untuk berkembang hanya akan menggeser biaya ke masa depan dan ke kelompok yang paling rentan.

Berdasarkan telaah tersebut, penulis memandang bahwa jawaban atas ketegangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan di negara yang sedang membangun tidak terletak pada pemilihan salah satu paradigma. Pertumbuhan hijau menyediakan instrumen untuk memperluas energi bersih, lapangan kerja, dan pembiayaan transisi, tetapi tanpa pembatasan ekstraksi dan keadilan distribusi, ia berisiko menjadi ekstraktivisme hijau. De-pertumbuhan menyediakan kritik yang tajam dan kerangka keadilan, tetapi tidak dapat dipindahkan begitu saja ke negara yang masih berjuang menurunkan kemiskinan. Perpaduan yang masuk akal adalah pembangunan selektif. Sektor yang memenuhi kebutuhan dasar dan energi bersih diperluas, sedangkan sektor yang bertumpu pada pembukaan hutan, batu bara, dan konsumsi berlebihan dibatasi dan dikurangi secara bertahap, dengan batas ekologis yang diukur secara biofisik serta tata kelola yang melibatkan masyarakat lokal. Gagasan

ini sejalan dengan pandangan Pollin (2018) tentang perlunya memperbesar sebagian sektor sekaligus menyusutkan sektor fosil, dan dengan tiga syarat pertumbuhan hijau yang bermakna yang telah dirumuskan penulis pada bagian sebelumnya.

SIMPULAN

Artikel ini ingin memahami bagaimana pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan bisa saling memengaruhi pada negara yang sedang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep trade-off tersebut tidak benar dianggap sebagai pilihan antara berkembang atau tidak berkembang. Pertumbuhan hijau penting karena tidak memaksa negara yang masih miskin untuk berhenti tumbuh, tetapi bukti nyata yang menunjukkan bahwa pertumbuhan dan kerusakan lingkungan tidak bisa dipisahkan sama sekali masih kurang kuat. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi terus berlangsung bersamaan dengan tingginya emisi dan deforestasi. Pertumbuhan yang kuat menjadi kritik terhadap klaim bahwa ekonomi bisa terlepas dari global, serta menyoroti sifat politik dari PDB dan ketimpangan lingkungan, tetapi lemah sebagai pedoman kebijakan karena sulit diimplementasikan dan pesannya lebih berfokus pada negara-negara maju, sehingga tidak bisa langsung diterapkan di negara-negara yang masih berjuang mengurangi kemiskinan.

Oleh karena itu, trade-off tersebut lebih baik dipahami sebagai pertanyaan tentang apa yang harus berkembang, apa yang harus berkurang, dan siapa yang harus membayar biayanya. Pembangunan yang dipilih secara selektif adalah jalan tengah yang masuk akal, yaitu memperluas sektor-sektor yang memenuhi kebutuhan dasar dan menggunakan energi yang bersih, sekaligus membatasi perlahan-lahan sektor-sektor yang bergantung pada penggalian hutan, batu bara, dan konsumsi yang berlebihan, dengan batas-batas ekologis yang diukur secara ilmiah dan sistem pengelolaan yang melibatkan masyarakat setempat. Karena artikel ini bersifat konseptual dan menggunakan data sekunder, kesimpulan ini belum mampu menguji dampak kebijakan secara sebab-akibat. Penelitian lebih lanjut dapat memeriksa tiga kondisi penting yang mendukung pertumbuhan hijau di sektor atau daerah tertentu di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aghion, P., Boppart, T., Peters, M., Schwartzman, M., & Zilibotti, F. (2025). A theory of endogenous degrowth and environmental sustainability (NBER Working Paper No. 33634). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w33634

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Agustus). Persentase penduduk miskin Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen [Siaran pers]. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/2594/persentase-penduduk-miskin-maret-2026-turun-menjadi-8-07-persen-.html

Batubara, B., Belland, M., & Kooy, M. (2025). Linking up degrowth in/from the South with provincialised UPE: Mangrove and groundwater conservations in Semarang, Indonesia. Asia Pacific Viewpoint, 66(1), 105-114. https://doi.org/10.1111/apv.12440

Brata, A. G. (2025, 24 Maret). Degrowth: Hipotesis dan realitas (Bab 7a). Dalam G. van Klinken (Ed.), Bacaan Bumi: Pemikiran ekologis. Inside Indonesia. https://www.insideindonesia.org/topics/bacaan-bumi/7a-degrowth

Gräbner-Radkowitsch, C., & Strunk, B. (2023). Degrowth and the Global South: The twin problem of global dependencies. Ecological Economics, 213, 107946. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2023.107946

Grossman, G. M., & Krueger, A. B. (1995). Economic growth and the environment. The Quarterly Journal of Economics, 110(2), 353-377.

Haberl, H., Wiedenhofer, D., Virág, D., Kalt, G., Plank, B., Brockway, P., … Creutzig, F. (2020). A systematic review of the evidence on decoupling of GDP, resource use and GHG emissions, part II: Synthesizing the insights. Environmental Research Letters, 15(6), 065003.

Harisman, R. (tahun). Pertumbuhan hijau di G20 dan strategi Indonesia. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Pertumbuhan%20hijau%20di%20G20%20dan%20strategi%20Indonesia.pdf

Hickel, J. (2019). Degrowth: A theory of radical abundance. real-world economics review, 87, 54-68.

Hickel, J. (2021). What does degrowth mean? A few points of clarification. Globalizations, 18(7), 1105-1111. https://doi.org/10.1080/14747731.2020.1812222

Hickel, J., & Kallis, G. (2020). Is green growth possible? New Political Economy, 25(4), 469-486.

Investortrust.id. (2026, 5 Agustus). Penduduk miskin per Maret 2026 tinggal 22,9 juta atau 8,07%, tapi kesenjangan sosial sedikit melebar. https://investortrust.id/macro/111941/penduduk-miskin-per-maret-2026-tinggal-22-9-juta-atau-8-07-tapi-kesenjangan-sosial-sedikit-melebar

Keyßer, L. T., & Lenzen, M. (2021). 1.5 °C degrowth scenarios suggest the need for new mitigation pathways. Nature Communications, 12, 2676. https://doi.org/10.1038/s41467-021-22884-9

Meadows, D. H., dkk. (1980). Batas-batas pertumbuhan: Sebuah laporan untuk Proyek The Club of Rome mengenai bahaya yang mengancam umat manusia (M. Maris, Penerj.). Jakarta: Gramedia. (Karya asli diterbitkan 1972)

Muarif, I. (2025). Implementasi kebijakan ekonomi hijau pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan, 2(3), 961-967. https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i3.2085

Muazam, A. R. (2026, 31 Maret). Gerry van Klinken bicara soal bencana Sumatera, kapitalisme sampai ekososialisme. Mongabay Indonesia. https://mongabay.co.id/2026/03/31/gerry-van-klinken-bicara-soal-bencana-sumatera-kapitalisme-sampai-ekososialisme/

Mu'min, M. S., Kartiko,

Naudé, W. (2023a). Melancholy hues: The futility of green growth and degrowth, and the inevitability of societal collapse (IZA Discussion Paper No. 16139). IZA Institute of Labor Economics. https://www.iza.org/publications/dp16139

Naudé, W. (2023b). We already live in a degrowth world, and we do not like it (IZA Discussion Paper No. 16191). IZA Institute of Labor Economics. https://www.iza.org/publications/dp16191

O'Neill, D. W., Fanning, A. L., Lamb, W. F., & Steinberger, J. K. (2018). A good life for all within planetary boundaries. Nature Sustainability, 1(2), 88-95. https://doi.org/10.1038/s41893-018-0021-4

Pollin, R. (2018). De-growth vs a Green New Deal. New Left Review, 112, 5-25. https://newleftreview.org/issues/ii112/articles/robert-pollin-de-growth-vs-a-green-new-deal

Rockström, J., Gupta, J., Qin, D., Lade, S. J., Abrams, J. F., Andersen, L. S., … Zhang, X. (2023). Safe and just Earth system boundaries. Nature, 619(7968), 102-111. https://doi.org/10.1038/s41586-023-06083-8

Rodríguez-Labajos, B., Yánez, I., Bond, P., Greyl, L., Munguti, S., Ojo, G. U., & Overbeek, W. (2019). Not so natural an alliance? Degrowth and environmental justice movements in the Global South. Ecological Economics, 157, 175-184.

Schmelzer, M., Vansintjan, A., & Vetter, A. (2022). The future is degrowth: A guide to a world beyond capitalism. London: Verso.

Tsuda, K. (2021). Naive questions on degrowth. New Left Review, 128. https://newleftreview.org/issues/ii128/articles/kenta-tsuda-naive-questions-0n-degrowth

Turner, G. M. (2008). A comparison of The Limits to Growth with 30 years of reality. Global Environmental Change, 18(3), 397-411.

van Klinken, G. (2025, 24 Maret). Kelimpahan setelah kapitalisme: Wacana degrowth (Bab 7b). Dalam G. van Klinken (Ed.), Bacaan Bumi: Pemikiran ekologis untuk Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia & Inside Indonesia. https://www.insideindonesia.org/topics/bacaan-bumi/7b-kelimpahan-setelah-kapitalisme

Vogel, J., & Hickel, J. (2023). Is green growth happening? An empirical analysis of achieved versus Paris-compliant CO2-GDP decoupling in high-income countries. The Lancet Planetary Health, 7(9), e759-e769.